



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 051.2/Kep. 4 -Insp/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9).
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 92, Seri D.41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Jadwal dan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2b/Kep. 4 -Insp/2019

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan pada Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan
2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja;
3. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
4. Kegiatan reuiu;
5. Kegiatan Monitoring dan evaluasi;
6. Kegiatan Jasa Konsultasi dan Sosialisasi:
7. Kegiatan Asistensi dan pendampingan; dan
8. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa
3. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan
4. Mengidentifikasi faktor risiko
5. Menetapkan bobot/ besaran risiko atas seluruh auditi
 - a) Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
 - b) Besaran risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
6. Menentukan tingkat risiko
7. Menetapkan peta risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
8. Menetapkan jenis pengawasan, dilengkapi dengan peta audit yang meliputi auditi, besaran risiko, tingkat risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, dukungan dana serta sarana dan prasarana.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b) Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c) Pemberian layanan konsultasi;

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- a) Kebijakan;
- b) Kelembagaan;
- c) Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Pengelolaan Keuangan;
- e) Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- f) Pencapaian Indeks Pelayanan Minimal, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d) Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a) Reviu dokumen perencanaan/RKA-SKPD;
- b) Reviu laporan keuangan;
- c) Reviu laporan kinerja instansi pemerintah; dan
- d) Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

5. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a) Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- d) Dana Desa;
- e) Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- f) Aksi Pencegahan Korupsi;
- g) Evaluasi SPIP;
- h) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- i) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- j) Penanganan *Whistle Blower System*;
- k) Penanganan Benturan Kepentingan;

- l) Penilaian Internal Zona Integritas;
- m) Verifikasi LHKPN;
- n) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- o) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- p) Pelayanan Publik.

6. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultasi

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadwal Program Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020

BUPATI CIREBON,



IMRON

NO	URAIAN /SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2020													TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								14	
I. Audit Operasional																							
1	Desa dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon																1. Menilai keataan/kepatuhan terhadap Keputusan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APUP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan keternahan pelaksanaan tugas	- Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Desa	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	- Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Berdomm, Mulus dan Sehat	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	5
UPT PUSKESMAS																							
1	UPT PUSKESMAS ASTAMALAPURA																1. Menilai keataan/kepatuhan terhadap Keputusan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APUP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan keternahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	185 - Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Bagi warga Mtkny/Cirebon bebas biaya Glai Buruk/Cirebon Gratis pelayanan jaminan 177.S Peralihan/Cirebon Sehat 170	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	6
2	UPT PUSKESMAS GEGESIK																			180	7	6	
3	UPT PUSKESMAS BABAKAN																			180	7	6	
4	UPT PUSKESMAS BEBER																			180	7	6	
5	UPT PUSKESMAS KARANG SEMBUNG																			180	7	6	
6	UPT PUSKESMAS CILEDUG																			180	7	6	
7	UPT PUSKESMAS TALUN																			180	7	6	
8	UPT PUSKESMAS GUMUNGGATT																			180	7	6	
9	UPT PUSKESMAS PLERED																			177.S	7	6	
10	UPT PUSKESMAS PALUMANAN																			177.S	7	6	
11	UPT PUSKESMAS PLUMBON																			172.S	7	6	
12	UPT PUSKESMAS DUKUPUTWANG																			170	7	6	
13	UPT PUSKESMAS MUNDU																			165	7	6	
14	UPT PUSKESMAS LOSARI																			157.5	7	6	
15	UPT PUSKESMAS SEYONG																			157.5	7	6	
16	UPT PUSKESMAS SUSIKAN																			157.5	7	6	
17	UPT PUSKESMAS SINDANG LAUT																			157.5	7	6	
18	UPT PUSKESMAS KAPETIKAN																			150	7	6	
19	UPT PUSKESMAS KLANGEMAN																			150	7	6	
20	UPT PUSKESMAS CIRIGO																			150	7	6	
21	UPT PUSKESMAS PANGEMAN																			150	7	6	
22	UPT PUSKESMAS GERANG																			150	7	6	
23	UPT PUSKESMAS KALIMEDI																			150	7	6	
24	UPT PUSKESMAS KAMARANG																			150	7	6	

NO	URAIAN /SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2020												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES									
64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	252,50	Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi warga Miskin/Cirebon bebas biaya Gizi Buruk/Cirebon Gratis pelayanan jaminan Fersalihan/Cirebon Sehat	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
65	DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN														1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	235,00	Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Bebas Biaya Pendidikan dan Bebas Pulus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah/Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
66	DINAS PEMADAM KEBAKARAN														1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	230,00	Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi warga Miskin/Cirebon bebas biaya Gizi Buruk/Cirebon Gratis pelayanan jaminan Fersalihan/Cirebon Sehat	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	15
67	DINAS KETAHANAN PANGAN														1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pengawasan BPK RI dan APIP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	230,00	Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Cirebon Gratis Pelayanan Kesehatan Bagi warga Miskin/Cirebon bebas biaya Gizi Buruk/Cirebon Gratis pelayanan jaminan Fersalihan/Cirebon Sehat	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	15

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES							
1														15	16	17	18	19	20	21
68	BAIDAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan ketemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang, Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	185,000 - Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Klinik Agribisnis Bagi Petani	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
69	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan ketemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang, Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	177,500 - Merupakan SKPD yang memiliki Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu Peyeediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau dan Cirebon Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RUTLAHU)	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
70	DINAS SOSIAL													1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan ketemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang, Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	175,000 - Risiko terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16
71	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBUDAYAAN PEREMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													1. Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Menilai apakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah berjalan 4. Melakukan pemantauan penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pengawasan BPK RI dan APP 5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan ketemahan pelaksanaan tugas	1. Tugas dan Fungsi 2. Pengelolaan Keuangan 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Pengelolaan Aparatur	1. Tata Kelola Keuangan 2. Tata Kelola Aset 3. Pengadaan Barang, Jasa 4. Tata Kelola Pegawai	175,000 - Risiko terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	8	16

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								13	14
79	RSUD ARJAWINANGUN														15	16	17	18	19	20	21	
80	DINAS PENDIDIKAN																					
81	DINAS KESEHATAN																					
82	BAHDAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																					
	Audit Kinerja atas Pendapatan Daerah																					
83	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																					
84	DINAS PERHUBUNGAN																					

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

- 1. Balanced Scorecard (BS)
- Perspektif Stakeholders
- Perspektif Internal Proses
- Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Perspektif Keuangan
- 2. Integrated Performance Management System (I-PMS)
- 3. Kerangka kerja
- *Program Logic*

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2020												TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN													Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan	Pengujian atas kinerja tugas dan fungsi SKPD	Seluruh Kegiatan Strategis SKPD	152,50	- Risiko pencapaian Visi Misi SKPD	1. Balanced Scorecard (BS) - Perspektif Stakeholders - Perspektif Internal Proses - Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan - Perspektif Keuangan 2. Integrated Performance Management System (I-PMS) 3. Kerangka kerja "Program Logis"	8	5
	II. Pemeriksaan Tujuan Tertentu																				
86	Paket Pengadaan Barang dan Jasa (48 (empat puluh delapan) Paket)													1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	- Proses Pengadaan Barang dan jasa dari mulai perencanaan dan	Proses Pengadaan Barang dan Jasa	- Risiko terkait kompleksitas Pengadaan Barang dan jasa	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	7	
87	Pedapatan Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)													1. Menilai ketepatan/kepatuhan terhadap Keperluan Perundang-undangan yang berlaku 2. Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis(3E) 3. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan apabila ditemukan kelemahan pelaksanaan tugas	Pendapatan Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan	Pendapatan Daerah	-	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	7	7	
	III. Pemeriksaan Lainnya																				
88	Revisi LKPD													Meyakini LKPD per 31 Desember 2017 telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan berdasarkan	LKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Th.2017, LK SKPD	Laporan yang disajikan oleh DPRD, Laporan Keuangan meliputi:LSA,	Memperlihatkan Opini BPK RI (WTP)	1. Pengumpulan data melalui sampling 2. Analisa dokumen	30	15	
89	Evaluasi Larkip													1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP ; tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka kewujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) 3. Peninjauan implementasi SAKIP. 4. Memonitor tindak lanjut rekomendasinya	1. Penilaian terhadap perencanaan strategis termasuk didalamnya kemampuan pencapaian penugasan dan penyajian informasi 3. Evaluasi terhadap Program dan kegiatan yang relevan 4. Evaluasi terhadap kebijakan SKPD yang	1. Kesesuaian antara Perencanaan dengan pencapaian kinerja 2. Penyajian dan informasi yang dapat di 3. Program dan kegiatan yang relevan 4. Kebijakan yang mendukung tercapainya	Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan	1. Penelitan dokumen 2. wawancara/Klarifikasi 3. Konsultasi/Diskusi	30	15	
90	Revisi Rencana Kerja Anggaran Th. 2020													Memberikan kejelasan terhadap akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi pada dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar biaya, kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran serta dilengkapinya dengan dokumen pendukungnya	Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Th 2020	Perumusan dan pentapan dokumen Rencana Kerja Anggaran	Keselarasan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan pelaporan	1. Penelitan dokumen 2. wawancara/Klarifikasi 3. Konsultasi/Diskusi	52	15	
91	Revisi Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAN) Fisik													1. Membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan berlaku 2. Memberikan kejelasan terhadap mengenai keandalan dan keabsahan Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output Kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik	- Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output Kegiatan DAK per jenis per bidang Tahun Anggaran - Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian Output Kegiatan DAK per jenis per bidang Tahap I dan II	Penerima Alokasi DAK Fisik yang mengajukan permohonan penyaluran DAK Fisik kepada KPPN	1. Penelitan dokumen 2. wawancara/Klarifikasi	7	7		

NO	URAIAN/SKPD	RENCANA JADWAL PENGAWASAN TAHUNAN 2020														TUJUAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	ANALISA RESIKO	TEKNIK PENGAWASAN	JUMLAH PERSONIL	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES										
1																15	16	17	18	19	20	21	
IV. Pemeriksaan Khusus																							
92	Pemantauan Kasus Pengaduan															Memberikan Pendapat atas Hasil Pemeriksaan terhadap Kebijakan, dan produk hukum lainnya yang dinilai melanggar ketentuan	Pemerintah Kabupaten Cirebon	SKPD/UPKD, dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten	Dengan Penyalahgunaan wewenang, Indisipliner,	1. Desk Audit/ Pemeriksaan Dokumen 2. Wawancara Klarifikasi 3. Analisa data 4. Survey Lapangan/ Pemeriksaan fisik	6	5	
V. Jasa Konsultasi																							
93	Konsultasi dan Sosialisasi															Memberikan pemahaman terkait kebijakan, produk hukum, dan prosedur terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi	Pemerintah Kabupaten Cirebon	SKPD/UPKD, dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten					
VI. Monitoring dan Evaluasi																							
94	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan																						
95	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP																						
96	Aksi Pencegahan Korupsi																						
97	Evaluasi SPP																						
98	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi																						
99	Penhanganan Laporan Gratifikasi																						
100	Penhanganan Whistle Blower Sistem																						
101	Penhanganan Benturan Kepentingan																						
102	Penilaian Internal Zona Integritas																						
103	Verifikasi LHKPN																						
104	Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																						
105	Penyenggaraan pemerintahan daerah																						
VI. Asistensi/Pendampingan																							
106	Operasionalisasi Sapi Bersih Pungutan Liar																						

Keterangan :

Tentative


 BUPATI CIREBON